AGRIBISNIS PERIKANAN

LAPORAN PENELITIAN DOSEN PROGRAM STUDI

KETERKAITAN KETIMPANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KERAWANAN SOSIAL DI WILAYAH PESISIR JAWA TIMUR

PENELITI :

Dr. Ir. Totok Hendarto, M.Si NIDN 0025016701

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS PERIKANAN

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS DR. SOETOMO

2017

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Keterkaitan Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi dan Kerawanan Sosial di Wilayah Pesisir Jawa Timur
2. Pelaksana

a.	Nama Lengkap	Dr. Ir., Totok Hendarto, MSi
b.	Jenis Kelamin	Laki-laki
c.	NIDN	0025016701
d.	Pangkat?Golongan	Pembina / IV a
e.	Jabatan Fungsfional	Lektor Kepala
f.	Alamat Kantor	Jl. Semolowaru No 84 Surabaya
g.	Telep/Faks/Alamat Surel	031–5941969 / 085691067047 thunitomo@yahoo.co.id

3. Lokasi Penelitian : Jawa Timur
4. Jangka Waktu Penelitian : 1 bulan
5. Biaya Penelitian : Tiga puluh Juta Rupiah
   a. Mandiri : Rp. 50.000.000,-
   b. Sumber lain : -

Mengetahui :
Dekan Fakultas Pertanian

Surabaya, 16 Nopember 2017
Pelaksana,

Ir. A. KUSYAIRI, M.Si
NPP. 90.01.1.074

Dr. Ir., TOTOK HENDARTO, MSi
NIP. 19670125 199203 1 003

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Dr. Soetomo

(Dr. SRI UTAMI ADY, SE. MM.)
NPP : 94.01.1.170

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN SAMPUL		i
HALAMAN PENGESAHAN		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GAMBAR		v
RINGKASAN		vi
BAB 1	PENDAHULUAN ……...	1
	1.1 Latar Belakang……..……..	1
	1.2 Lingkup Kegiatan Penelitian …….	2
	1.3 Perumusan Masalah …….……..….	2
	1.4 Hipotesis……...…….…….	2
BAB 2	TINJAUAN PUSTAKA ……...……...	3
	2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi ……..……..	3
	2.2 Ketimpangan Pendapatan ……..……	4
	2.3 Perubahan dan Kerawanan Sosial ……	5
BAB 3	TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN ……..	8
	3.1 Tujuan Penelitian……..……..	8
	3.2 Manfaat Penelitian …….……	8
BAB 4	METODE PENELITIAN…….……	9
	4.1 Kosepsi Dasar ……..……..	9
	4.2 Sumber Data ……..……..……..	11
	4.3 Metode Analisis ……..…….……..	11
BAB 5	HASIL DAN PEMBAHASAN…….……...	12
	5.1 Profile dan Uji Beda ……..……...…….	12
	5.2 Uji Korelasi ……..…….…….	19
PUSTAKA	…….....…	23
Lampiran	…….....…	25

DAFTAR TABEL

TABEL		Hal
1	Profil Angka Gini Rasio Wilayah Pesisir Jawa Timur 2008-2017	12
2	Profile Uji Beda Wilayah Pesisir atas Dasar Angka Gini Rasio	13
3	Profil Angka Kemiskinan Wilayah Pesisir Jawa Timur 2008-2017	13
4	Profile Uji Beda Wilayah Pesisir atas Dasar Angka Kemiskinan	14
5	Profil Angka Pengangguran Terbuka Wilayah Pesisir Jawa Timur 2008-2017	15
6	Profile Uji Beda Wilayah Pesisir atas Dasar Angka Pengangguran Terbuka	15
7	Profil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wilayah Pesisir Jawa Timur 2008-2017	16
8	Profile Uji Beda Wilayah Pesisir atas Dasar Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	17
9	Profil Kerawanan Sosial Wilayah Pesisir Jawa Timur 2013-2017	18
10	Profile Uji Beda Wilayah Pesisir atas Dasar Angka Kerawanan Sosial	18
11	Profile Uji Korelasi Angka Gini Rasio terhadap Angka Kerawanan Sosial Tipologi Wilayah	19
12	Profile Uji Korelasi Angka Kemiskinan terhadap Angka Kerawanan Sosial Tipologi Wilayah	20
13	Profile Uji Korelasi Angka Pengangguran Terbuka terhadap Angka Kerawanan Sosial Tipologi Wilayah	20
14	Profile Uji Korelasi Angka IPM terhadap Angka Kerawanan Sosial Tipologi Wilayah	21

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		Hal
1	Profil Angka Gini Rasio Wilayah Pesisir Jawa Timur 2008-2017	13
2	Profil Angka Kemiskinan Wilayah Pesisir Jawa Timur 2008-2017	14
3	Profil Angka Pengangguran Terbuka Wilayah Pesisir Jawa Timur 2008-2017	16
4	Profil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wilayah Pesisir Jawa Timur 2008-2017	17
5	Profil Kerawanan Sosial Wilayah Pesisir Jawa Timur 2008-2017	19

RINGKASAN

Pembangunan ekonomi yang tinggi, adil dan merata merupakan hal yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan perekonomian baik itu nasional maupun regional karena tujuan dari pembangunan ekonomi yang sesungguhnya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Perumusan masalah adakah ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan kerawanan social di wilayah pesisir Jawa Timur ? Adakah ketimpangan orientasi pembangunan diantara tipologi wilayah pesisir Jawa Timur ? Tujuan Penelitian Menganalisis profile pertumbuhan ekonomi faktor angka gini rasio, kemiskinan, pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan kerawanan social di wilayah pesisir Jawa Timur. Mengidentifikasi keterkaitan ketimpangan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kerawanan social tipologi wilayah pesisir Jawa Timur

Metode analisis korelasi dan analisis uji beda. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dan diperoleh melalui data pada publikasi website resmi Badan Pusat Statistik.

Disimpulkan terdapat ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan kerawanan social diantara tipologi wilayah Pantura, Daratan dan Pansela. Terdapat ketimpangan orientasi pembangunan diantara tipologi wilayah Pantura, Daratan dan Pansela. Saran : Orientasi pembangunan diwilayah tipologi Pantura sebaiknya berdasar lebih kearah pengembangan sumberdaya manusia. Orientasi pembangunan diwilayah tipologi Pansela sebaiknya berdasar lebih kearah pengembangan infrastruktur fisik guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang tinggi, adil dan merata merupakan hal yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan perekonomian baik itu nasional maupun regional karena tujuan dari pembangunan ekonomi yang sesungguhnya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan berbagai perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat baik di berbagai bidang seperti politik, sosial, dan ekonomi. Perubahan-perubahan tersebut dapat berupa meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya angka produktivitas, berkurangnya angka kemiskinan, lebih meratanya distribusi tingkat pendapatan .

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan (http://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan ekonomi).

Pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Hal itu juga sekaligus menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi) yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut (Sukirno, 2006)..

Kemampuan suatu daerah dalam memajukan wilayahnya pasti dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi perlu diteliti agar dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah relatif tertinggal. Apabila pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal dapat dipacu, maka diharapkan hal ini dapat mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan ekonomi antar kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur.

1.2 Lingkup Kegiatan Penelitian

Ruang lingkup penelitian menganalisis ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan kerawanan social serta orientasi pembangunan di wilayah pesisir Jawa Timur.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Adakah ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan kerawanan social di wilayah pesisir Jawa Timur ?
2. Adakah ketimpangan orientasi pembangunan diantara tipologi wilayah pesisir Jawa Timur ?

1.4. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat dirumuskan bahwa ;

1. Diduga terdapat ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan kerawanan social di wilayah pesisir Jawa Timur ?
2. Diduga terdapat ketimpangan orientasi pembangunan diantara tipologi wilayah pesisir Jawa Timur ?

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertubuhan ekonomi adalah suatu proses tumbuh kembangnya aktifitas perekonomian disuatu wilayah sebagai hasil interaksi menyeluruh dari unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi investasi, perkembangan teknologi dan hasil produksi (Mankiw, 2007). Pertubuhan ekonomi juga merupakan suatu bentuk fungsi produksi yang lebih umum, yang bisa memahami berbagai alternative kemungkinan substitusi antar investasi modal dan tenaga kerja. Wujud pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan dari kemampuan suatu negara dalam meningkatkan kegiatan dan aktivitas unit produksinya yang tidak hanya ditentukan potensi negara yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan pula oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas investasi modal (Boediono, 1992).

Pemahaman secara umum, pertumbuhan ekonomi merupakan nilai total peningkatan perekonomian dalam suatu wilayah administrasi yang memproduksi barang dan jasa. Dan seringkali pertumbuhan ekonomi dijadikan salah satu indikator penting dalam melakukan analisis pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan besarnya pendapatan masyarakat pada suatu Negara pada periode tertentu. Pendapatan masyarakat diperoleh melalui proses penggunaan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa, sehingga menghasilkan perputaran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur menggunakan parameter Produk Domestik Bruto (Sukirno, 2006).

Suatu pertumbuhan ekonomi adalah besarnya kapasitas produksi barang dan jasa jangka panjang dari suatu negara untuk melayani kebutuhan masyarakatnya. Kapasitas produksi ditentukan oleh adanya kemajuan dan peningkatan penggunaan teknologi, kematangan kelembagaan, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Kuznet menyatakan hipotesis tentang hubungan pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan ketimpangan distribusi pendapatan di antara penduduknya berbentuk huruf U terbalik. Yang

menjelaskan bahwa awal suatu pertumbuhan yang diukur dengan produk nasional bruto perkapita, kesenjangan distribusi pendapatan diukur dengan indeks Gini akan semakin meningkat. Selanjutnya kesenjangan distribusi pendapatan akan menurun dalam situasi tertentu (Todaro, 2003).

2.2 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan dalam suatu Negara bisa dicerminkan oleh tingkat distribusi pendapatannya pada rentang waktu tertentu. Cara mudah untuk mengetahui nilai ketimpangan pendapatan adalah menggunakan angka gini rasio. Dengan perhitungan angka gini ini maka seluruh lapisan penerima pendapatanakan dapat terlihat dengan jelas. Angka gini rasio berkisar antara nol sampai satu, dengan pemahaman : jika angka gini rasio bernilai 0, maka tingkat ketimpangan pendapatan dinyatakan merata sempurna. Tetapi jika angka gini rasionya bernilai 1, maka ketimpangan pendapatan sangat timpang atau tingkat pendapatan yang terjadi hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok kecil saja dari suatu Negara.

Pada awal proses pembangunan disuatu Negara, seringkali mempunyai nilai ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi karena proses sosiologis berjalan bertahap dalam bentuk industrialisasi yang diikuti oleh urbanisasi secara massif. Sedangkan pada akhir suatu proses pembangunan di suatu negara, ketimpangan pendapatan berangsur-angsur menurun, yang terlihat pada saataktifitas ekonomi perkotaan telah menyerap sebagian besar tenaga kerja yang berasal dari pedesaan.

Hipotesis yang diajukan oleh ekonom Kusnetz beberapa kali diuji melalui penelitian empiris dari sejumlah Negara, menunjukkan bahwa sebagian besar hasil penelitian tersebut mendukung secara konstruktif dari hipotesis Kuznets, sedangkan sebagian lainnyatidak sependapat dengan teori dan hipotesis tersebut. Hal ini menunjukkan adanya suatu relasi yang belum nyata antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Walaupun hipotesis itu diterima, tetapi sebagian besar membuktikan terdapat hubungan yang bersifat negatif antara pertumbuhan dan ketimpangan jangka panjang terutama akan terjadi pada kelompok negara industri maju (Deininger dan Squire, 1996).

Hasil penelitian Wahyuni (2004) menyatakan terdapat hubungan yang bersifat negatif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi bersifat meningkat maka ketimpangan pendapatan akan mengalami penurunan. Sedangkan, Waluyo (2004) mencermati interaksi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dan pengaruh nya terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Hasil pengamatan menunjukkan terdapat hubungan yang bersifat negatif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan.

2.3 Perubahan dan Kerawanan Sosial

Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Tidak semua gejala-gejala sosial yang mengakibatkan perubahan dapat dikatakan sebagai perubahan sosial. Adapun ciri-ciri dari gejala yang dapat mengakibatkan perubahan social adalah setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena mereka mengalami perubahan baik lambat maupun cepat, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti dengan perubahan pada lembaga sosial lainnya, perubahan sosial yang cepat dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang bersifat sementara sebagai proses penyesuaian diri, serta perubahan yang tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual karena keduanya memiliki hubungan timbal balik yang kuat.

Terjadinya perubahan sosial di segala bidang disebabkan adanya ilmu pengetahuan yang semakin berkembang mengikuti jaman. Berdasarkan cepat lambatnya, perubahan social dibedakan menjadi dua bentuk umum yaitu perubahan yang berlangsung cepat (perubahan revolusi) dan perubahan yang berlangsung lambat (perubahan evolusi). Dalam revolusi, perubahan dapat terjadi dengan direncanakan atau tidak direncanakan, pada perubahan ini sering diawali dengan ketegangan atau konflik dalam tubuh masyarakat yang bersangkutan. Sementara dalam evolusi, perubahan sosial dapat terjadi karena dorongan dari

usaha-usaha masyarakat guna menyesuaikan diri terhadapat kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu (BPS, 2016).

Permasalahan kemajemukan bukanlah persoalan baru, tetapi sesuatu yang sudah ada sejak lama. Kemajemukan masyarakat bisa dilihat dari banyak sisi, diantaranya yaitu; majemuk secara horizontal, ditandai kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat serta kedaerahan., secara vertikal, struktur masyarakat ditandai adanya perbedaan-perbedaan lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Ciri yang mencolok dari kemajemukan masyarakat adalah penekanan pada pentingnya kesukubangsaan yang wujud dalam bentuk komuniti-komuniti sukubangsa dan digunakan sebagai acuan jati diri yang utama. Hubungan kesukubangsaan adalah hubungan peran yang berlaku dalam kehidupan sosial coraknya berlandaskan pada hubungan antara sukubangsa dalam masyarakat setempat.

Kesukubangsaan dalam kehidupan masyarakat adalah sebuah dunia yang primordial yang utama dan yang pertama dikenal dalam proses sosialisasi dan enkulturasi, yang mempunyai fungsi menentukan posisi-posisi para pelaku dari suku bangsa dalam suatu struktur hubungan peran yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat setempat.

Saat ini tidak ada lagi komuniti sukubangsa yang secara homogen hidup pada suatu daerah. Konsep mengenai sukubangsa dalam pertentangannya dengan suku bangsanya sebagai acuan jatidiri untuk berperan dalam hubungan antara sukubangsa bukan hanya diperoleh dari pengalaman-pengalaman sebagai perorangan, melainkan juga dari berbagai cerita orang lain, berita media massa, baik cetak maupun elektronik. Kesukubangsaan bagi bangsa bukan hanya sebuah dunia filosofi, melainkan juga sebuah dunia nyata yang harus dihadapi sehari-hari dalam berbagai bentuk ekspresinya, secara sadar maupun tidak sadar (Suparlan dalam Antropologi Indonesia, 2001: 2-3).

Struktur masyarakat majemuk pada dasarnya tidak bisa ditafsirkan sebagai ancaman bagi kohesivitas sosial. Sebaliknya justru menjadi potensi besar pembentukan masyarakat yang demokratis, yang dicirikan terbangunnya civil society (Heru Nugroho dalam UNISIA, 1999: 129). Keberagaman sebagian kalangan menganggap bahwa merupakan sumber konflik yang dapat meledak

kapan saja dan mengancam integrasi nasional. Sara adalah realitas sosial yang tidak dapat dielakkan oleh siapa pun, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Realitas ini telah menjadi nasib bagi setiap masyarakat di manapun masyarakat itu berada. Kenyataan social menegaskan bahwa masyarakat di dunia ini terdiri dari berbagai macam etnis, agama dan golongan. Kenyataan seperti itu tidak jarang menciptakan problem sosial seperti masalah konflik dan disintegrasi, tetapi pada sudut lain (berdasarkan temuan-temuan historis) sara justru dijadikan arena pemberdayaan dan demokrasi (Nugroho dalam UNISIA, 1999: 127).

Beberapa pandangan menunjukkan pluralisme dipahami sebagai salah satu faktor yang dapat menimbulkan konflik-konflik sosial, baik karena bertolak dari suatu kepentingan (vestest interest) yang sempit, maupun yang bertolak dari supremasi budaya kelompok masyarakat tertentu. Pandangan semacam ini sepenuhnya tidak dapat disalahkan, karena dalam banyak kasus di beberapa negara banyak terjadi konflik yang dilator belakangi persoalan pluralisme (Tobroni dan Syamsul Arifin, 1994).

Dalam kehidupan modern, masalah pluralisme dapat dikatakan sebagai hal yang perlu mendapat respon secara arif dan konstruktif. Pluralisme merupakan kenyataan sosiologis yang tidak dapat dihindari. Ia merupakan bagian dari sunnatullah, sebagai kenyataan yang telah menjadi kehendak Tuhan. Penyelesaian implikasi negatif dari pluralisme tidak harus dengan cara yang mengarah pada pengingkaran kenyataan pluralisme itu sendiri. Cara demikian, seringkali nampak pada upaya menciptakan suatu hegemonitas berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pencegahan implikasi negatif pluralism yang perlu dilakukan pertama-tama adalah pengembangan sikap arif dalam menerima pluralisme. Pengembangan pluralism menjadi kekuatan sinergis dalam kehidupan masyarakat di masa depan. Demokrasi mempunyai peran strategis dalam konteks pluralisme yang akan menjadi landasan etis. (Tebba, 1993).

III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis profile pertumbuhan ekonomi faktor angka gini rasio, kemiskinan, pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan kerawanan social di wilayah pesisir Jawa Timur.
2. Mengidentifikasi keterkaitan ketimpangan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kerawanan social tipologi wilayah pesisir Jawa Timur

3.2 Manfaat penelitian

1. Mengetahui profile pertumbuhan ekonomi dari sisi angka gini rasio, kemiskinan, pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan kerawanan social di wilayah pesisir Jawa Timur.
2. Mengetahui keterkaitan ketimpangan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kerawanan social di wilayah pesisir Jawa Timur

IV. METODE PENELITIAN

4.1 Kosepsi Dasar

Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan perseorangan (*personal distribution of income*) atau distribusi ukuran pendapatan (*size distribution of income*) secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Individu diurutkan semua hanya berdasarkan pendapatan yang diterimanya, lantas membagi total populasi menjadi sejumlah kelompok atau ukuran. Biasanya populasi dibagi total populasi menjadi lima kelompok, atau kuintil (*quintiles*) atau sepuluh kelompok yang disebut desil (*decile*) sesuai dengan tingkat pendapatan mereka, menetapkan berapa proporsi yang diterima oleh masingmasing kelompok dari pendapatannasional total (Todaro, 2006: 234).

Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal.

Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang diaggap manusiawi. Kemiskinan absolut untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemiskinan Relatif Kemiskinan yang lebih banyak ditentukan oleh masyarakat sekitarnya. Walaupun pendapatan seseorang telah mencapai kebutuhan dasar minimum, tetapi apabila masyarakat sekitar pendapatannya lebih tinggi, maka dikatakan miskin. Garis kemiskinan akan mengalami perubahan jika tingkat hidup masyarakatnya berubah. Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan adalah 1.

Pertumbuhan berkelanjutan yang prokemiskinan, Pengembangan social yang mencakup: pengembangan SDM, modal social, perbaikan status perempuan, dan perlindungan social, dan 3. Manajemen ekonomi makro dan pemerintahan yang baik yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan.

Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. Besar kecilnya tingkat pengangguran berdasarkan persentase dari perbandingan jumlah orang yang menganggur dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah orang yang termasuk angkatan kerja akan tetapi tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan.

Indeks Pembangunan Manusia (*IPM*)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai *"a process of enlarging people's choices"* atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai, dan standar hi dup yang layak. Secara spesifik UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), keberlanjutan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Indeks Pembangunan Manusia (*IPM*) merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik, dan sebagainya. Empat hal pokok yang perlu di perhatikan dalam pembangunan manusia adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995: 12).

Kerawanan Sosial

Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Abraham Maslow dalam teori hierarkhi kebutuhan manusia, rasa aman berada pada tingkatan yang kedua dibawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting. Rasa aman (*security*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, social dan ekonomi. Sejalan dengan itu, statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi masyarakat merasa semakin tidak aman.

4.2 Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dan diperoleh melalui data pada publikasi website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan data lainnya yang diperlukan.

4.3 Metode Analisis

Analisis regresi linier sederhana dan analisis uji beda. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu 1. Menentukan nilai variabel respon (y), 2. Melakukan analisis deskriptif terhadap variabel. 3. Menganalisis dengan uji, 4. Membandingkan nilai t hitung dan t tabel 5. Membandingkan nilai signifikan. dengan probabilitas, 6. Intrepretasi model

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Profile dan Uji Beda

5.1.1 Angka Gini Rasio

Angka gini rasio cara mudah untuk mengetahui nilai ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan dalam suatu Negara bisa dicerminkan oleh tingkat distribusi pendapatannya pada rentang waktu tertentu. Angka gini rasio di 3 tipologi wilayah disajikan pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1. Profil Angka Gini Rasio Wilayah Pesisir Jawa Timur 2008-2017

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	Pantura	0.28	0.27	0.25	0.29	0.31	0.31	0.28	0.31	0.31	0.32	0.29
2	Daratan	0.26	0.26	0.25	0.30	0.32	0.31	0.30	0.33	0.33	0.33	0.30
3	Pansela	0.27	0.27	0.27	0.32	0.31	0.32	0.29	0.34	0.34	0.34	0.31

NB.
Pantura = Pantai Utara Jawa Timur
Pansela = pantai Selatan Jawa Timur

Pada tabel 1 terlihat bahwa nilai angka gini rasio rata-rata tertinggi selama 10 tahun terakhir adalah di wilayah Pansela mencapai 0,31. Wilayah dengan nilai angka gini rasio rata-rata terendah selama 10 tahun terakhir adalah di wilayah Pantura. Sedangkan wilayah daratan mempunyai nilai angka gini rasio rata-rata selama 10 tahun terakhir sebesar 0,30.

Ketika dilakukan uji beda seperti yang tersaji pada tabel 2, antara wilayah Pantura dengan wilayah daratan menghasilkan keputusan yang tidak berbeda nyata. Hal ini dikarenakan infrastruktur di kedua wilayah tersebut hampir sama kondisinya. Sedangkan ketika dilakukan uji beda antara wilayah Pantura dengan wilayah Pansela dan wilayah Daratan dengan Pansela menghasilkan keputusan yang berbeda nyata.

Tabel 2. Profile Uji Beda Wilayah Pesisir atas Dasar Angka Gini Rasio

No	Wilayah	Uji Beda
1.	Angka Gini Ratio	
	a. Pantura - Daratan	Tidak Berbeda
	b. Daratan - Pansela	Berbeda
	c. Pantura - Pansela	Berbeda

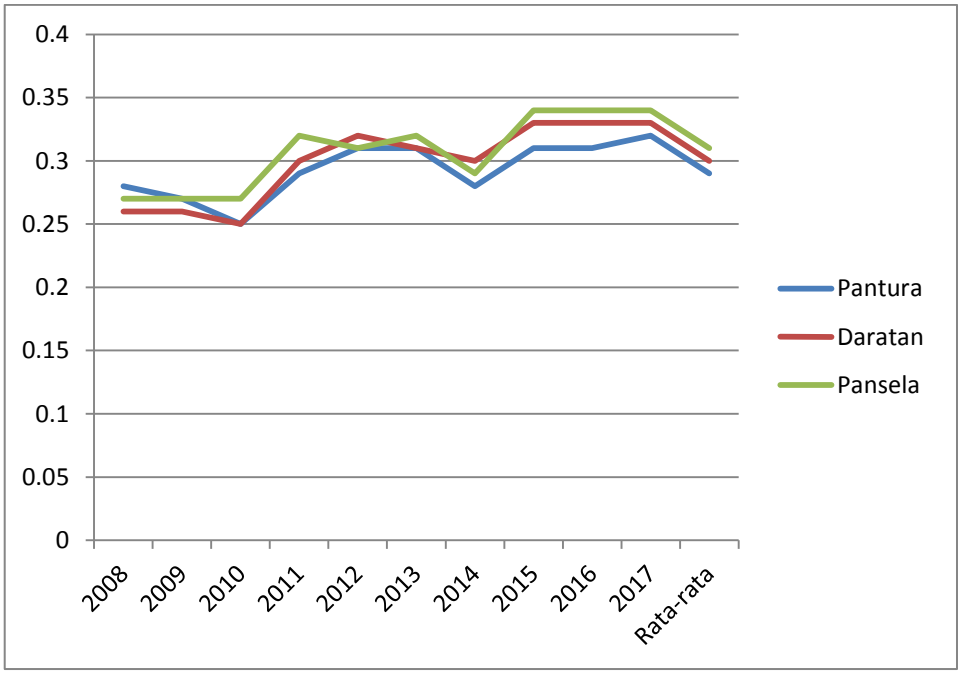

Gambar 1. Profil Angka Gini Rasio Wilayah Pesisir Jawa Timur 2008-2017

5.1.2 Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang diaggap manusiawi. Angka kemiskinan di 3 tipologi wilayah disajikan pada tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3. Profil Angka Kemiskinan Wilayah Pesisir Jawa Timur 2008-2017

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	Pantura	227.29	202.84	195.23	182.96	174.74	171.24	166.91	169.06	168.20	165.20	**182.367**
2	Daratan	152.06	136.14	125.68	117.57	112.26	110.24	107.34	108.52	106.52	100.02	**117.635**
3	Pansela	213.92	189.67	180.13	168.78	161.19	147.33	155.62	156.89	154.17	146.64	**167.434**

Pada tabel 3 terlihat bahwa nilai angka kemiskinan rata-rata tertinggi selama 10 tahun terakhir adalah di wilayah Pantura mencapai 182.367. Wilayah dengan nilai angka kemiskinan rata-rata terendah selama 10 tahun terakhir adalah di wilayah Daratan. Sedangkan wilayah Pansela mempunyai nilai angka kemiskinan rata-rata selama 10 tahun terakhir sebesar 167.434. Dikawatirkan di wilayah Pantura terjadi gejala pencucian wilayah yang semakin lama semakin menurun jumlahnya.

Ketika ketika dilakukan uji beda antara wilayah Pantura dengan wilayah Daratan, wilayah Daratan dengan wilayah Pansela, dan wilayah Pantura dengan wilayah Pansela menghasilkan keputusan yang berbeda nyata. Hal ini menunjukkan bahwa ke 3 tipologi wilayah tersebut berbeda satu sama lainnya berkenaan dengan jumlah kemiskinan.

Tabel 4. Profile Uji Beda Wilayah Pesisir atas Dasar Angka Kemiskinan

No	Wilayah	Uji Beda
1.	Angka Kemiskinan	
	a. Pantura - Daratan	Berbeda
	b. Daratan - Pansela	Berbeda
	c. Pantura - Pansela	Berbeda

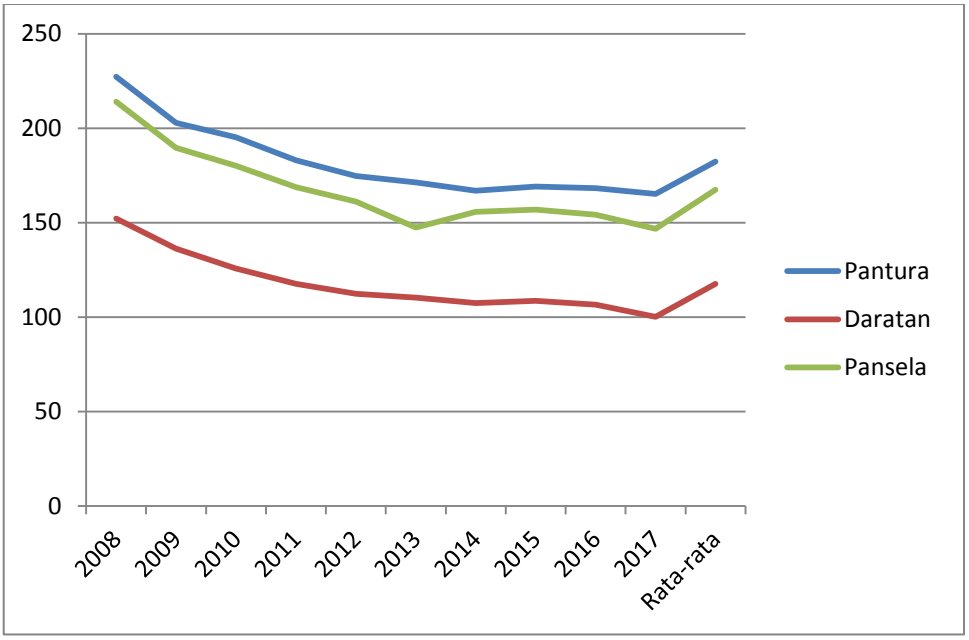

Gambar 2. Profil Angka Kemiskinan Wilayah Pesisir Jawa Timur 2008-2017

5.1.3 Angka Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah orang yang termasuk angkatan kerja akan tetapi tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan. Angka pengangguran terbuka di 3 tipologi wilayah disajikan pada tabel 5 dibawah ini :

Tabel 5. Profil Angka Pengangguran Terbuka Wilayah Pesisir Jawa Timur 2008-2017

No	Uraian	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	Rata-rata
1	Pantura	6.50	5.18	4.45	5.18	4.67	4.08	3.85	4.51	4.23	3.95	**4.66**
2	Daratan	6.14	4.78	4.08	5.40	3.84	3.94	3.84	4.40	4.15	3.91	**4.45**
3	Pansela	4.84	3.88	2.98	4.30	3.28	3.53	3.91	3.34	3.13	2.91	**3.61**

Pada tabel 5 terlihat bahwa nilai angka pengangguran terbuka rata-rata tertinggi selama 10 tahun terakhir adalah di wilayah Pantura mencapai 4,66 %. Wilayah dengan nilai angka pengangguran terbuka rata-rata terendah selama 10 tahun terakhir adalah di wilayah Pansela mencapai 3,61 %. Sedangkan wilayah Daratan mempunyai nilai angka pengangguran terbuka rata-rata selama 10 tahun terakhir sebesar 4,45%.

Ketika ketika dilakukan uji beda antara wilayah Pantura dengan wilayah Daratan, wilayah Daratan dengan wilayah Pansela dan wilayah Pantura dengan wilayah Pansela menghasilkan keputusan yang berbeda nyata. Hal ini menunjukkan bahwa ke 3 tipologi wilayah tersebut berbeda satu sama lainnya berkenaan dengan jumlah pengangguran terbuka.

Tabel 6. Profile Uji Beda Wilayah Pesisir atas Dasar Angka Pengangguran Terbuka

No	Wilayah	Uji Beda
1.	Angka Pengangguran Terbuka	
	a. Pantura - Daratan	Berbeda
	b. Daratan - Pansela	Berbeda
	c. Pantura - Pansela	Berbeda

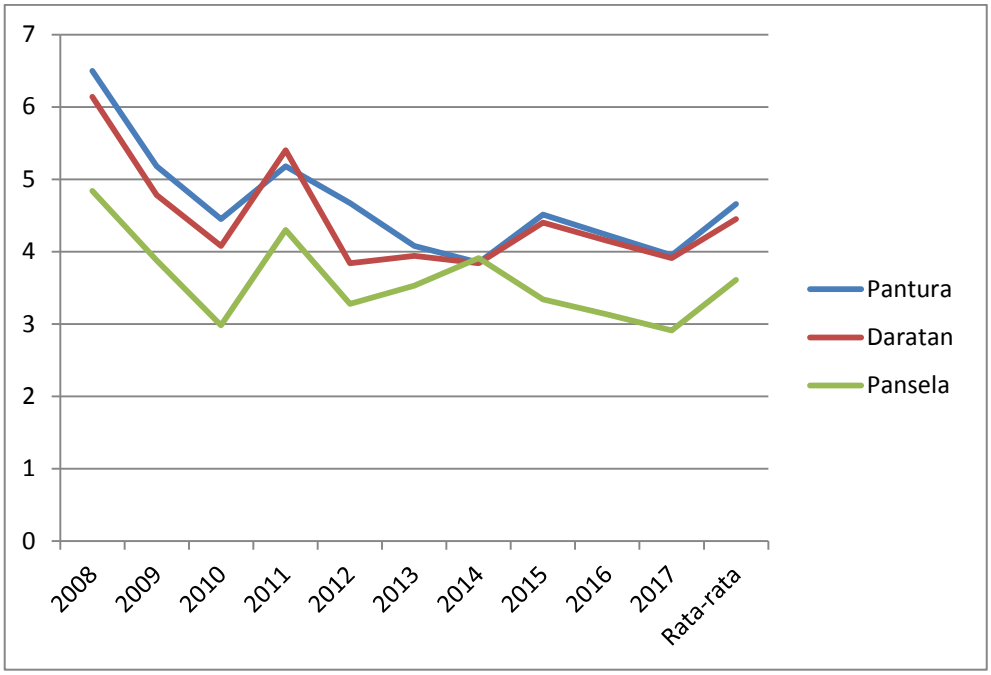

Gambar 3. Profil Angka Pengangguran Terbuka Wilayah Pesisir Jawa Timur 2008-2017

5.1.4 Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia dipahami sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik, dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 3 tipologi wilayah disajikan pada tabel 7 dibawah ini :

Tabel 7. Profil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wilayah Pesisir Jawa Timur 2008-2017

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	Pantura	62.87	63.65	64.44	65.26	66.29	67.38	67.85	68.54	69.15	69.94	66.54
2	Daratan	63.64	64.39	65.14	66.12	67.19	67.93	68.35	69.03	69.62	70.37	67.18
3	Pansela	62.18	62.80	63.41	64.13	64.79	65.46	65.85	66.67	67.48	68.10	65.09

NB :
1. *Tingkat Pembangunan Manusia Rendah : 0,000 – 0,499.*
2. *Tingkat Pembangunan Manusia Menengah : 0,500 – 0,799*
3. *Tingkat Pembangunan Manusia Tinggi : 0,800 – 1,000.*

Pada tabel 7 terlihat bahwa nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rata-rata tertinggi selama 10 tahun terakhir adalah di wilayah Daratan mencapai 67,18 . Wilayah dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rata-rata terendah selama 10 tahun terakhir adalah di wilayah Pansela mencapai 65,09 %. Sedangkan wilayah Pantura mempunyai nilai angka pengangguran terbuka rata-rata selama 10 tahun terakhir sebesar 66.54.

Ketika ketika dilakukan uji beda antara wilayah Pantura dengan wilayah Daratan, wilayah Daratan dengan wilayah Pansela dan wilayah Pantura dengan wilayah Pansela menghasilkan keputusan yang berbeda nyata. Hal ini menunjukkan bahwa ke 3 tipologi wilayah tersebut berbeda satu sama lainnya berkenaan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel 8. Profile Uji Beda Wilayah Pesisir atas Dasar Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Wilayah	Uji Beda
1.	Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
	a. Pantura - Daratan	Berbeda
	b. Daratan - Pansela	Berbeda
	c. Pantura - Pansela	Berbeda

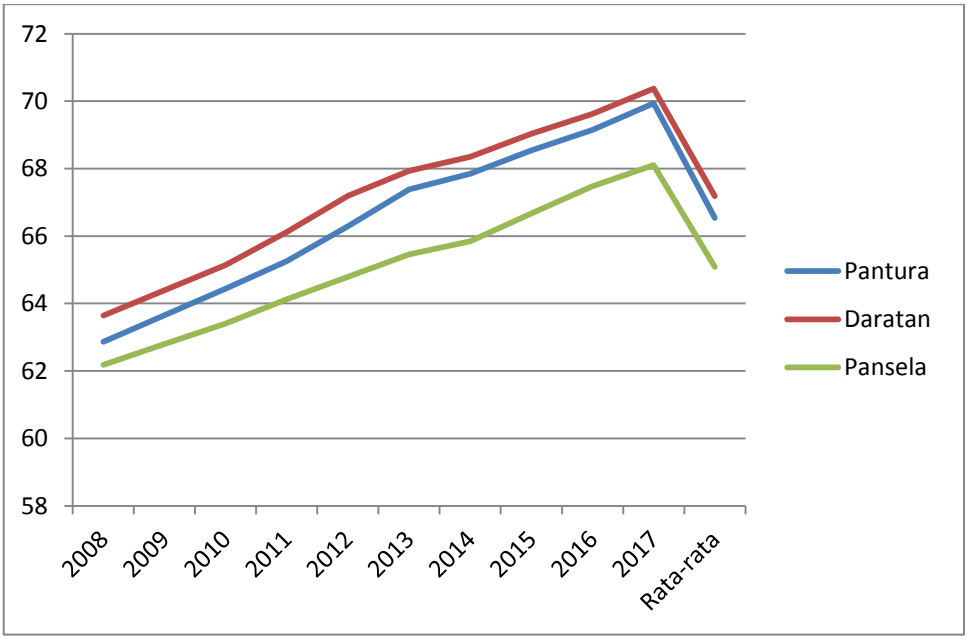

Gambar 4. Profil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wilayah Pesisir Jawa Timur 2008-2017

5.1.5 Angka Kerawanan Sosial

Rasa aman berada pada tingkatan yang kedua dibawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting. Kerawanan Sosial di 3 tipologi wilayah disajikan pada tabel 9 dibawah ini :

Tabel 9. Profil Kerawanan Sosial Wilayah Pesisir Jawa Timur 2013-2017

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	Pantura	249	498	747	996	884	862	1008	1178	1224	1270	892
2	Daratan	150	300.4	450.2	600.1	631.6	627.5	527	538.5	523.3	508	486
3	Pansela	301	602	902	1202	901	890	864	884	805	725	808

Pada tabel 9 terlihat bahwa nilai kerawanan social rata-rata tertinggi selama 10 tahun terakhir adalah di wilayah Pantura mencapai 892 . Wilayah dengan nilai kerawanan social rata-rata terendah selama 10 tahun terakhir adalah di wilayah Daratan mencapai 486. Sedangkan wilayah Pansela mempunyai nilai kerawanan social rata-rata selama 10 tahun terakhir sebesar 808.

Ketika ketika dilakukan uji beda antara wilayah Pantura dengan wilayah Daratan, wilayah Daratan dengan wilayah Pansela sama-sama menghasilkan keputusan yang berbeda nyata. Hal ini menunjukkan bahwa ke 2 tipologi wilayah tersebut berbeda satu sama lainnya berkenaan dengan kerawanan social. Sedangkan untuk wilayah Pantura dengan wilayah pansela didapatkan hasil yang tidak berbeda nyata.

Tabel 10. Profile Uji Beda Wilayah Pesisir atas Dasar Angka Kerawanan Sosial

No	Wilayah	Uji Beda
1.	Angka Kerawanan Sosial	
	a. Pantura - Daratan	Berbeda
	b. Daratan - Pansela	Berbeda
	c. Pantura - Pansela	Tidak Berbeda

Gambar 4. Profil Kerawanan Sosial Wilayah Pesisir Jawa Timur 2008-2017

5.2 Uji Korelasi

5.2.1 Uji Korelasi Angka Gini Rasio terhadap Angka Kerawanan Sosial

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui kekuatan atau keeratan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Hasil perhitungan uji korelasi antara angka Gini Rasio terhadap angka Kerawanan Sosial disajikan pada tabel 11 dibawah ini :

Tabel 11. Profile Uji Korelasi Angka Gini Rasio terhadap Angka Kerawanan Sosial Tipologi Wilayah

No	Wilayah	Uji Korelasi
1.	Angka Gini Rasio dengan Kerawanan Sosial	
	a. Pantura	Berpengaruh
	b. Daratan	Berpengaruh
	c. Pansela	Tidak Berpengaruh

Pada tabel 11 terlihat bahwa antara angka Gini rasio dengan angka kerawanan social di wilayah Pantura adalah berpengaruh, begitu juga dengan wilayah Daratan. Sedangkan diwilayah Pansela angka Gini rasio dengan angka kerawanan social di wilayah Pantura adalah tidak berpengaruh.

5.2.2 Uji Korelasi Angka Kemiskinan terhadap Angka Kerawanan Sosial

Hasil perhitungan uji korelasi antara angka Kemiskinan terhadap angka Kerawanan Sosial disajikan pada tabel 12 dibawah ini :

Tabel 12. Profile Uji Korelasi Angka Kemiskinan terhadap Angka Kerawanan Sosial Tipologi Wilayah

No	Wilayah	Uji Korelasi
1.	Angka Kemiskinandengan Kerawanan Sosial	
	a. Pantura	Berpengaruh
	b. Daratan	Berpengaruh
	c. Pansela	Tidak Berpengaruh

Pada tabel 12 terlihat bahwa antara angka Kemiskinan dengan angka kerawanan social di wilayah Pantura adalah berpengaruh, begitu juga dengan wilayah Daratan. Sedangkan diwilayah Pansela angka Kemiskinan dengan angka kerawanan social di wilayah Pantura adalah tidak berpengaruh.

5.2.3 Uji Korelasi Angka Pengangguran Terbuka terhadap Angka Kerawanan Sosial

Hasil perhitungan uji korelasi antara angka Pengangguran Terbuka terhadap angka Kerawanan Sosial disajikan pada tabel 13 dibawah ini :

Tabel 13. Profile Uji Korelasi Angka Pengangguran Terbuka terhadap Angka Kerawanan Sosial Tipologi Wilayah

No	Wilayah	Uji Korelasi
1.	Angka Pengangguran dengan Kerawanan Sosial	
	a. Pantura	Berpengaruh
	b. Daratan	Berpengaruh
	c. Pansela	Tidak Berpengaruh

Pada tabel 13 terlihat bahwa antara angka Pengangguran Terbuka dengan angka kerawanan social di wilayah Pantura adalah berpengaruh, begitu juga dengan wilayah Daratan. Sedangkan diwilayah Pansela angka Pengangguran Terbuka dengan angka kerawanan social di wilayah Pantura adalah tidak berpengaruh.

5.2.4 Uji Korelasi Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Angka Kerawanan Sosial

Hasil perhitungan uji korelasi antara angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap angka Kerawanan Sosial disajikan pada tabel 14 dibawah ini :

Tabel 14. Profile Uji Korelasi Angka IPM terhadap Angka Kerawanan Sosial Tipologi Wilayah

No	Wilayah	Uji Korelasi
1.	Angka IPM dengan Kerawanan Sosial	
	a. Pantura	Berpengaruh
	b. Daratan	Berpengaruh
	c. Pansela	Tidak Berpengaruh

Pada tabel 14 terlihat bahwa antara angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan angka kerawanan social di wilayah Pantura adalah berpengaruh, begitu juga dengan wilayah Daratan. Sedangkan diwilayah Pansela angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan angka kerawanan social di wilayah Pantura adalah tidak berpengaruh.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Memahami profile Pantura memiliki angka gini rasio terendah, kemiskinan tertinggi, pengangguran tertinggi, indeks pembangunan manusia menengah dan kerawanan social tertinggi. Profile Daratan memiliki angka gini rasio menengah, kemiskinan terendah, pengangguran menengah, indeks pembangunan manusia tertinggi dan kerawanan social terendah. Profile Pansela memiliki angka gini rasio tertinggi, kemiskinan menengah, pengangguran terendah, indeks pembangunan manusia terendah dan kerawanan social menengah.

Tipologi Pantura dan Daratan menunjukkan adanya hubungan antara angka gini rasio, kemiskinan dan indeks pembangunan manusia terhadap kerawanan social. Tipologi Pansela tidak menunjukkan adanya hubungan antara angka gini rasio, kemiskinan dan indeks pembangunan manusia terhadap kerawanan social.

Maka dapat disimpulkan :

1. Terdapat ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan kerawanan social diantara tipologi wilayah Pantura, Daratan dan Pansela.
2. Terdapat ketimpangan orientasi pembangunan diantara tipologi wilayah Pantura, Daratan dan Pansela.

6.2. Saran

1. Orientasi pembangunan diwilayah tipologi Pantura sebaiknya berdasar lebih kearah pengembangan sumberdaya manusia
2. Orientasi pembangunan diwilayah tipologi Pansela sebaiknya berdasar lebih kearah pengembangan infrastruktur fisik guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2016. Nomor Publikasi : 35523.07.01. Katalog BPS : 4104002.35 Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Boediono. 1992.Teori Pertumbuhan Ekonomi. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu ekonomi. Edisi 1. Cetakan Ke 5. Jogyakarta. BPFE.

Deininger K dan Squire L. 1996. Measuring Inequality: A New Data Base (Online). World Bank. (http://www.cid. harvard.edu/hiid/537.pdf, diakses tanggal 5 Februari 2016)

Kurnial Ilahi Jamaluddin Rabain, 2016. Pemetaan Kerukunan dan Kerawanan Sosial Kehidupan Umat Beragama di Kabupaten Kuantan Singingi.

Lestari Agusalim,2016. Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Desentralisasi di Indonesia. Universitas Trilogi. lestariagusalim@gmail. com. *KINERJA, Volume 20, No.1, Th. 2016: Hal. 53-68*

Mankiw NG. 2007. Makroekonomi: Edisi 6. Pent. Fitria Liza dan Imam Nurmawan. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Nugroho, Heru, 1999. "Konstruksi SARA, Kemajemukan dan Demokrasi" dalam Jurnal UNISIA No. 40/XXII/IV, Yogyakarta: UII

Sukirno S. 2006. Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan. Cetakan Ketiga. Jakarta. Penerbit Kencana.

Suparlan, Parsudi, 2001. "Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia" dalam Jurnal Antropologi Indonesia, No. 66 Sept-Des., Jakarta: UI.

Tebba, Sudirman, 1993. Islam Orde Baru: Perubahan Politik dan Keagamaan, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Tobroni dan Syamsul Arifin, 1994, Islam Pluralisme Budaya dan Politik, Yogyakarta: SI Press.

Todaro MP dan SC Smith. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jilid 1. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.

Todaro MP. 2003. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs. Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia.

United Nations Development Programme (1995) *Human Development Report 1995*, Published for United Nations Development Programme. New York: Oxford University Press.

Vebby Yunita, Harlen, Hainim Kadir. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Provinsi Riau, Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia. JOM FEKON Vol. 1 no. 2 Oktober 2014

Wahyuni H. 2004. Is There A Link Between Increased Growth And Reduced Income Inequality? Analysis Of Cross-Country Studies. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Vol 1, No.1, Februari, hal 1-9.

Waluyo J. 2004. Hubungan Tingkat Kesenjangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi: Suatu studi lintas negara". Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 9 No. 1, Juni, hal: 1-20.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi, 5 Januari 2014

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Keterkaitan Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi dan Kerawanan Sosial di Wilayah Pesisir Jawa Timur
2. Pelaksana

a.	Nama Lengkap	Dr. Ir., Totok Hendarto, MSi
b.	Jenis Kelamin	Laki-laki
c.	NIDN	0025016701
d.	Pangkat?Golongan	Pembina / IV a
e.	Jabatan Fungsfional	Lektor Kepala
f.	Alamat Kantor	Jl. Semolowaru No 84 Surabaya
g.	Telep/Faks/Alamat Surel	031–5941969 / 085691067047 thunitomo@yahoo.co.id

3. Lokasi Penelitian : Jawa Timur
4. Jangka Waktu Penelitian : 1 bulan
5. Biaya Penelitian : Tiga puluh Juta Rupiah
   a. Mandiri : Rp. 50.000.000,-
   b. Sumber lain : -

Mengetahui :
Dekan Fakultas Pertanian

Ir. A. KUSYAIRI, M.Si
NPP. 90.01.1.074

Surabaya, 16 Nopember 2017
Pelaksana,

Dr. Ir., TOTOK HENDARTO, MSi
NIP. 19670125 199203 1 003

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Dr. Soetomo

(Dr. SRI UTAMI ADY, SE. MM.)
NPP : 94.01.1.170